

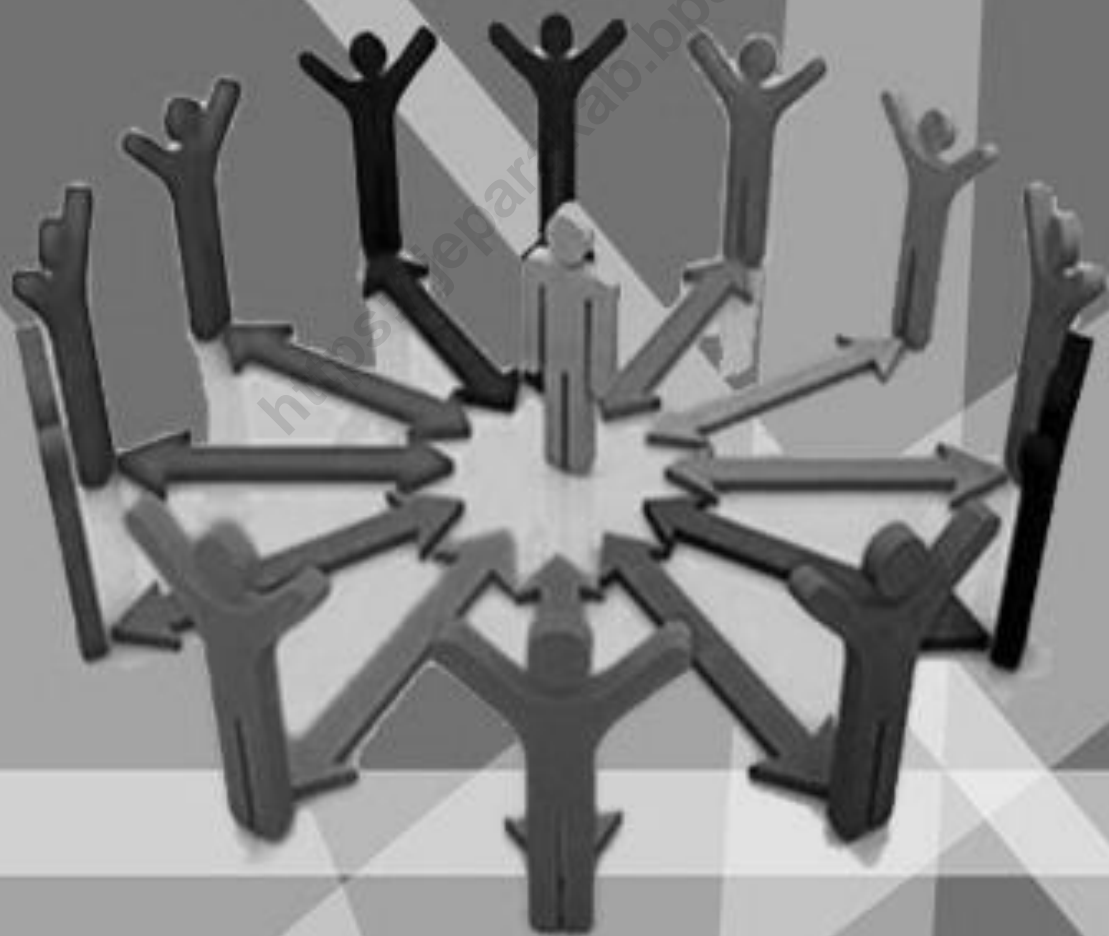
Katalog : 4101002.3320

# STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN JEPARA**

**STATISTIK  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN JEPARA  
2016**



# **STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA 2016**

**Katalog** : 4101002.3320  
**No. Publikasi** : 33200.17.21  
**Ukuran Buku** : 14,8 cm x 21 cm  
**Jumlah Halaman** : ix + 40 halaman

***Naskah :***

Seksi Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara  
Pengarah : Murdiyono, S.Si, M.M.  
Penanggung Jawab / Editor : Paranto, S.Si, MSi.  
Penulis : Agus Winyarto, S.ST

***Gambar Kulit :***

Seksi Statistik Sosial  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara

***Diterbitkan oleh :***

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik***

## KATA PENGANTAR

Publikasi “*Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jepara 2016*” merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. Publikasi ini memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai bahan informasi dalam melakukan evaluasi hasil pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Informasi yang tercakup dalam publikasi ini melingkupi kesejahteraan rakyat di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sumber data pokok yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2015 dan 2016.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

**Jepara, November 2017**  
**Badan Pusat Statistik**  
**Kabupaten Jepara**

Kepala,



**Murdiyono, S.Si, M.M.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR ISTILAH TEKNIS .....	vii
<b>BAB I KENPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA ....</b>	<b>3</b>
1.1 Kondisi Wilayah .....	3
1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan .....	3
1.3 Struktur Umur Penduduk .....	5
1.4 Rasio Ketergantungan.....	6
1.5 Umur Perkawinan Pertama, Fertilitas dan Keluarga Berencana .	7
<b>BAB II KESEHATAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Derajat Kesehatan .....	13
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan.....	15
2.3 Kepemilikan Jaminan Kesehatan .....	17
2.4 Penolong Proses Kelahiran .....	19
2.5 Kebiasaan Merokok .....	20
<b>BAB III PENDIDIKAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tingkat Pendidikan.....	26
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	27
3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	28
3.4 Angka Partisipasi Murni (APM).. .....	29
<b>BAB IV PERUMAHAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Penguasaan Tempat Tinggal .....	33
4.2 Kualitas Rumah Tempat Tinggal .....	35
4.3 Fasilitas Perumahan .....	36
4.4 Bahan Bakar Memasak .....	38
4.5 Penguasaan Alat Komunikasi .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kependudukan Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016	4
Tabel 1.2	Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2015-2016 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah	7
Tabel 1.3	Kawin Menurut Alat KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016	10
Tabel 2.1	Persentase Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit di Kabupaten Jepara Tahun 2015–2016	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat di Kabupaten Jepara Tahun 2016	16
Tabel 2.3	Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kabupaten Jepara Tahun 2016	18
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama sebulan terakhir menurut jumlah batang rokok yang dihisap per minggu di Kabupaten Jepara	21
Tabel 3.1	Presentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016	26
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016	28
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016	29
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016	30
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan Tempat Tinggal Kabupaten Jepara, 2015-2016	36
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal yang dikuasai di Kabupaten Jepara Tahun 2016	37

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2015-2016	4
Grafik 1.2	Persentase Wanita Umur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Jepara Tahun 2015	8
Grafik 1.3	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB di Kabupaten Jepara 2015	9
Grafik 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Jepara Tahun 2016	16
Grafik 2.2	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak yang terakhir di Kabupaten Jepara Tahun 2016	19
Grafik 2.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kebiasaan Merokok selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Jepara, 2016	21
Grafik 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Jepara Tahun 2016	34
Grafik 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Jepara Tahun 2016	35
Grafik 4.3	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak di Kabupaten Jepara, 2016	38
Grafik 4.4	Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitarnya, 2016	39

# DAFTAR ISTILAH TEKNIS

## KEPENDUDUKAN

1. Kepadatan Penduduk  
Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut.
2. Rasio Jenis Kelamin  
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.
3. Rasio Ketergantungan  
Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun/anak-anak dan 65 tahun ke atas/lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.
4. Rata-rata Umur Perkawinan Pertama  
Rata-rata umur seorang wanita pada saat melaksanakan perkawinan yang pertama kali.
5. Partisipasi Keluarga Berencana  
Proporsi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
6. Kontrasepsi Tetap (Kontap)  
Alat/cara KB yang bersifat permanen/tetap, meliputi: MOW, MOP, AKDR/IUD dan Susuk/Implant.

## KESEHATAN

1. Angka Kesakitan/Morbiditas  
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

## PENDIDIKAN

1. APS (Angka Partisipasi Sekolah)  
Proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.
2. APM (Angka Partisipasi Murni)  
Proporsi jumlah anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan.
3. APK (Angka Partisipasi Kasar)



Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah Tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angkanya maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

## **PERUMAHAN**

1. Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari sebatas atap.

2. Dinding Rumah

Sisi luar/batas dari suatu bangunan/penyekat dengan bangunan fisik lain.

3. Atap Rumah

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.

4. Atap Layak

Jenis atap yang digunakan antara lain beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

5. Fasilitas Air Minum

Instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau Non PAM/PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa.

6. Fasilitas Buang Air Besar

Kemudahan suatu rumah tangga dalam menggunakan jamban.

7. Tangki

Tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah pemukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

# BAB 1

## KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

<https://jeparakab.bps.go.id>

<https://jeparakab.bps.go.id>

# BAB I

## KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

### 1.1. Kondisi Wilayah

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berada di sisi utara Propinsi Jawa Tengah. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Letaknya pada 5°43'20,67" sampai 6°47' 25,83" Lintang Selatan dan 110°9'48,02" sampai 110°58' 37,40" Bujur Timur. Kabupaten Jepara mempunyai ketinggian 0 – 1.301 meter di atas permukaan laut. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km

Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas 1004,132 km<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah sawah seluas 265,816 km<sup>2</sup> atau sebesar 26 persen dan tanah kering seluas 738,316 km<sup>2</sup> atau sebesar 74 persen. Secara administratif jepara terdiri atas 16 Kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan. Menurut topografi desa, terdapat 2 desa yang berada di daerah lembah/daerah aliran sungai, terdapat 22 desa/kelurahan yang berada di lereng punggung bukit, terdapat 137 desa/kelurahan yang berada di daerah dataran dan terdapat 34 desa/kelurahan yang berada di daerah pantai.

### 1.2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan suatu negara. Namun pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga akan

menimbulkan masalah yang akan menghambat pembangunan. Informasi tentang kependudukan menjadi sangat penting bagi suatu daerah sebagai pijakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan manusia, baik itu yang terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Informasi kependudukan tersebut salah satunya dapat dilihat dari hasil Susenas yang menghasilkan statistik indikator kesejahteraan rakyat antara lain dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan perekonomian yang melingkupi tingkat pengeluaran untuk konsumsi penduduk.

**Tabel 1.1. Indikator Kependudukan Kabupaten Jepara Tahun 2014-2016**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	1004,132	1004,132	1004,132
Jumlah Penduduk	1 169 322	1 183 894	1 201 403
Laki-laki	583 106	590 330	599 047
Perempuan	586 216	593 564	602 356
Sex Ratio	99,47	99,46	99,45
Kepadatan Penduduk	1165	1179	1196

*Sumber : Susenas 2014, 2015 dan 2016*

Pada tahun 2016 perkiraan jumlah penduduk hasil Susenas 2016 Kabupaten Jepara mencapai 1.201.403 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri atas 599.047 penduduk laki-laki dan 602.356 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki ternyata lebih rendah

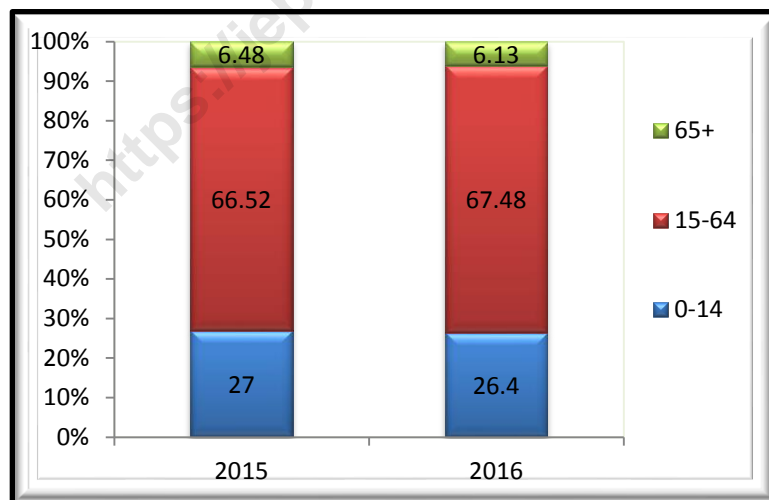
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 99,45.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mencapai 1.196 penduduk per km<sup>2</sup> atau meningkat sebanyak 17 orang per km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2015 yang hanya 1.179 penduduk per km<sup>2</sup>.

### 1.3. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur merupakan salah satu karakteristik penduduk yang mempunyai pengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*single age*) dan yang dikelompokkan dalam lima tahunan.

**Grafik 1.1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2015-2016**



Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen

atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk.

Struktur umur penduduk Kabupaten Jepara mengalami transisi menuju ke penduduk tua. Struktur tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia dewasa (15-64 tahun) serta kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Berdasarkan pengolahan data Susenas 2016, pada Grafik 1.2 terlihat distribusi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa 26,4 persen penduduk Kabupaten Jepara yang berusia muda, 67,48 persen berusia produktif, dan hanya 6,13 persen yang berusia tua.

Karakteristik penduduk dengan struktur penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain lain.

#### **1.4. Rasio Ketergantungan**

*Rasio ketergantungan (dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Indikator tersebut secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 1.2. Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2015-2016**

Tahun	Rasio Ketergantungan		
	Muda	Tua	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	40,60	9,74	50,34
2016	39,12	9,08	48,20

Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Rasio ketergantungan di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mencapai 48,20 persen atau dengan kata lain pada tahun 2016 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 penduduk usia tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya rasio ketergantungan relatif lebih rendah yaitu 48,20 persen pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2015 sebesar 50,34 persen.

Sementara dari sisi kelompok usia tua dan muda, rasio ketergantungan penduduk usia muda relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia tua yaitu 39,12 persen untuk usia muda dan 9,08 persen untuk penduduk usia tua.

### 1.5. Umur Perkawinan Pertama, *Fertilitas* dan Keluarga Berencana

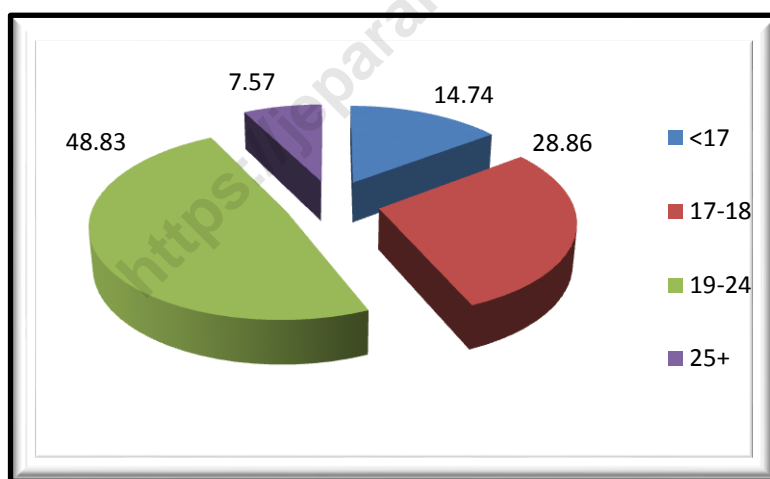
Kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (migrasi) penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk di suatu wilayah. Tingginya *fertilitas* yang diiringi rendahnya *mortalitas* akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bila hal tersebut tidak ditangani secara serius maka akan menghambat proses pembangunan.

Tingginya *fertilitas* akan terkait dengan usia perkawinan pertama. Semakin muda usia seorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan memperpanjang masa reproduksinya sehingga peluang



banyak anak yang dilahirkan semakin besar. Untuk itu pemerintah sudah mengatur tentang umur perkawinan pertama seseorang melalui UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

**Grafik 1.2 Persentase Wanita Umur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Kawin Pertama di Kabupaten Jepara Tahun 2016**



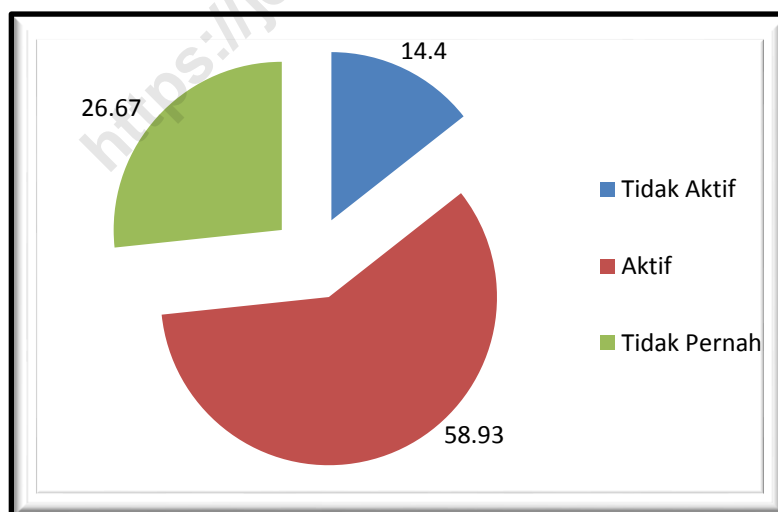
Sumber : Susenas 2016

Pada tahun 2016 di Kabupaten Jepara ada 14,74 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang melaksanakan perkawinan pertama pada umur kurang dari 17 tahun. Sementara presentase terbesar umur perkawinan pertama pada wanita umur 10 tahun ke atas ada pada kelompok umur 19 – 24 tahun yaitu mencapai 48,83 persen. Hampir 15 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang melaksanakan perkawinan

pertama tidak sesuai dengan aturan pemerintah yaitu kurang dari usia 17 tahun, harus menjadi perhatian dari semua pihak. Usaha yang dilakukan bisa melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat oleh pemerintah, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Selain itu bisa dilakukan bimbingan kepada remaja mengenai pendidikan seks dan resiko pernikahan di bawah umur.

Selain melalui penundaan umur perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah kesadaran untuk ikut menyukseskan program Keluarga Berencana. Dengan keluarga berencana diharapkan kesejahteraan terwujud keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui pembatasan jumlah anak dan pengaturan jarak kelahiran yang dapat dilakukan dengan pemakaian alat kontrasepsi KB.

**Grafik 1.3. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB di Kabupaten Jepara 2016**



Sumber : Susenas 2016

Pada tahun 2016 dari wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin ada 14,4 persen yang tidak aktif ikut KB tidak aktif (pada saat pencacahan tidak menggunakan, tetapi pernah menggunakan

alat kontrasepsi) sedangkan yang secara aktif (pada saat pencacahan masih menggunakan) sebanyak 59,93 persen, dan sisanya 26,67 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

**Tabel 1.3. Presentase Wanita Umur 15–49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Jepara Tahun 2014 - 2016**

Alat KB	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Kontap	1,66	3,29	2,96
IUD/Spiral	3,37	2,43	2,94
Suntikan	71,16	72,82	75,11
Susuk	7,52	7,06	5,84
Pil KB	15,21	12,34	10,83
Kondom dll	1,08	2,06	2,32

Sumber : Susenas 2014, 2015, dan 2016

Dari 58,93 persen wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi, 75,11 persen menggunakan alat kontrasepsi suntik. Persentase tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72,82 persen wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi berikutnya yang mempunyai presentase tinggi yaitu pil KB yang mencapai 10,83 persen dari wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin dan menggunakan alat kontrasepsi pada tahun 2015. Penggunaan alat kontrasepsi trennya mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

## BAB 2

# KESEHATAN

<https://jeparakab.bps.go.id>

<https://jeparakab.bps.go.id>

## **BAB II**

# **K E S E H A T A N**

Sehat merupakan sebuah kondisi maksimal, baik dari fisik, mental dan sosial seseorang sehingga dapat melakukan suatu aktifitas yang menghasilkan sesuatu. Kondisi tubuh yang sehat pada manusia dapat kita lihat dari kebugaran tubuh. Kesehatan adalah sebuah investasi yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kesehatan menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari derajat kesehatan. Dengan derajat kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas fisik penduduk yang berdampak pada peningkatan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

### **2.1. Derajat Kesehatan**

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas hidup penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang

dipakai untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah angka kesakitan (*morbiditas*). Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari yang terjadi selama satu bulan sebelum pencacahan. Program pembangunan di bidang kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

**Tabel 2.1. Persentase Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit di Kabupaten Jepara Tahun 2015 - 2016**

Uraian	2015	2016
(1)	(3)	(4)
<b>Angka Kesakitan ( % )</b>		
Laki-laki	21,99	25.34
Perempuan	23,16	28.63
Laki-laki+Perempuan	22,58	26,99
<b>Rata-rata Lama Sakit (hari)</b>		
< 4	49,67	52,13
4 - 7	37,45	34,57
8 - 14	4,73	5,15
15 - 21	3,82	2,40
22 - 30	4,33	5,75

Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Angka kesakitan dari tahun 2015 ke tahun 2016 menunjukkan adanya kenaikan dari 22,58 persen menjadi 26,99 persen. Bila dilihat dari jenis kelamin pada tahun 2016 angka kesakitan perempuan lebih tinggi dari angka kesakitan laki-laki, begitupun juga tahun sebelumnya. Hal ini

dapat diartikan perempuan pada tahun 2016 dan tahun 2015 relatif lebih rentan kesehatannya dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.1 juga menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu dalam satu bulan terakhir menurut lamanya hari terganggu. Menurut hasil Susenas 2016, ada sebanyak 52,13 persen yang mengalami sakit selama kurang dari 4 hari, sedangkan yang mengalami sakit antara 4-7 hari sebesar 34,57 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata lama sakit yang dialami oleh penduduk kabupaten Jepara cenderung meningkat.

## **2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan**

Tersedianya fasilitas kesehatan menjadi hal penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu kemudahan dalam menjangkau sarana dan fasilitas kesehatan juga tidak kalah penting. Salah satu hal yang dapat menjadi indikator sejauh mana segala sarana dan fasilitas kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan adalah berapa banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

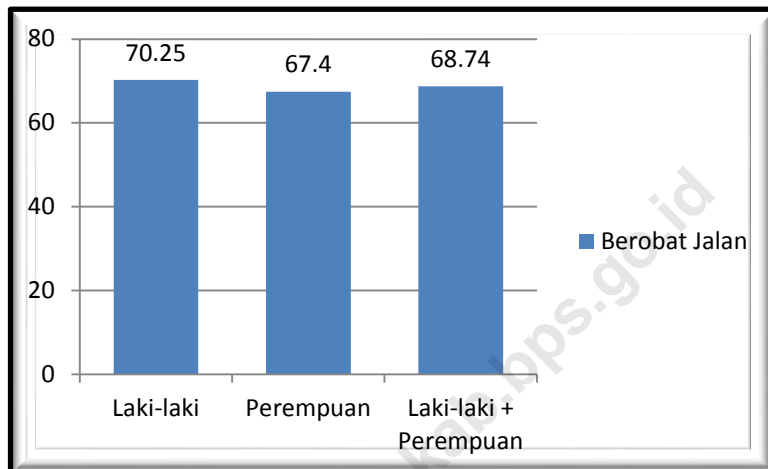
Pada tahun 2016 dari seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan 68,74 persennya melakukan berobat jalan. Animo penduduk laki-laki dalam berobat jalan manakala mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada penduduk perempuan 67,4 persen dari perempuan yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan, sementara dari seluruh laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan hanya 70,25 yang melakukan berobat jalan.

Alasan tidak melakukan berobat jalan adalah karena mereka melakukan pengobatan sendiri yaitu 58,98 persen dan 35,54 persen



menyatakan tidak merasa perlu melakukan berobat jalan.

**Grafik 2.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Jepara Tahun 2016**



Sumber : Susenas 2016

**Tabel 2.2. Presentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Tempat/Cara Berobat	Persentase
(1)	(2)
1. RS Pemerintah	5,2
2. RS Swasta	3,63
3. Praktek Dokter/Bidan	68,85
4. Klinik/Praktek Dokter Bersama	5,84
5. Puskesmas/Pustu	15,42
6. UKBM	3,13
7. Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	2,28
8. Lainnya	0,6

Sumber : Susenas 2016

Persentase penduduk yang berobat jalan ditinjau menurut

tempat atau cara berobatnya pada tahun 2016 terbesar adalah pada praktek dokter/bidan yaitu sebesar 68,85 persen diikuti Puskesmas/Pustu yaitu 15,42 persen. Kondisi ini dapat dimengerti karena akses ke kedua tempat tersebut relatif lebih mudah disamping biayanya lebih terjangkau.

### **2.3. Kepemilikan Jaminan Kesehatan**

Program pembangunan kesehatan bukan hanya dititikberatkan pada kemudahan akses menuju lokasi sarana dan fasilitas kesehatan namun juga pada aspek pelayanan kesehatannya, salah satunya adalah masalah pembiayaan. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya maka pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

(JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggung-jawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

**Tabel 2.3. Presentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Jaminan Kesehatan	Persentase
(1)	(2)
1. BPJS Kesehatan	13,15
2. BPJS Ketenagakerjaan	1,49
3. Askes/Asabri/Jamsostek	2,92
4. Jamkesmas/PBI	24,69
5. Jamkesda	1,23
6. Asuransi Swasta	0,33
7. Perusahaan/Kantor	0,26
8. Tidak memiliki	56,48

Sumber : Susenas 2016

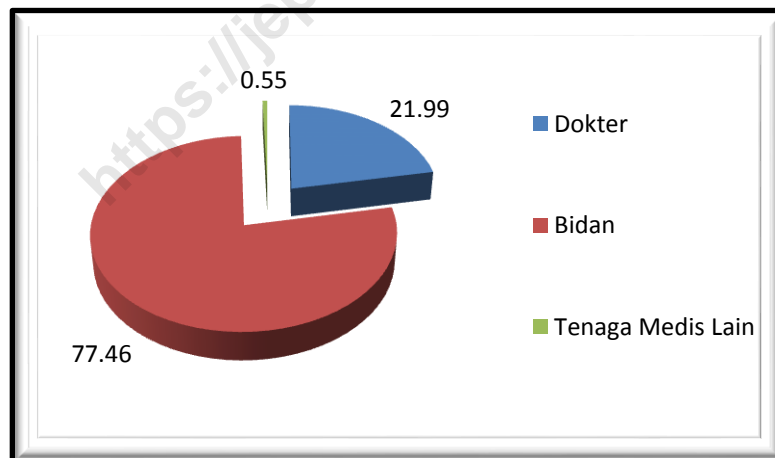
Peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Jepara terbanyak adalah peserta Jamkesmas/PBI sebesar 24,69 persen di ikuti dengan peserta BPJS Kesehatan sebesar 13,15 persen kemudian

Askes/Asabri/Jamsostek sebesar 2,92 persen dan Jamkesda 1,23 persen. Sementara itu masih ada 56,48 persen yang masih belum memiliki jaminan kesehatan.

#### 2.4. Penolong Proses Kelahiran

Status kesehatan ibu dan anak di Indonesia sampai saat ini masih harus menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terampil merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam menangani persoalan tersebut. Salah satunya indikator tentang kesadaran masyarakat dalam masalah kesehatan ibu dan anak adalah siapa penolong dan dimana proses ibu melahirkan anak.

**Grafik 2.2. Presentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak yang terakhir di Kabupaten Jepara Tahun 2016**



Sumber : Susenas 2016

Tabel 2.2 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir di Kabupaten Jepara sebagian besar adalah oleh Bidan (77,46 persen) dan Dokter (21,99 persen). Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat cenderung

lebih untuk mengunjungi bidan, baik bidan praktek maupun bidan desa.

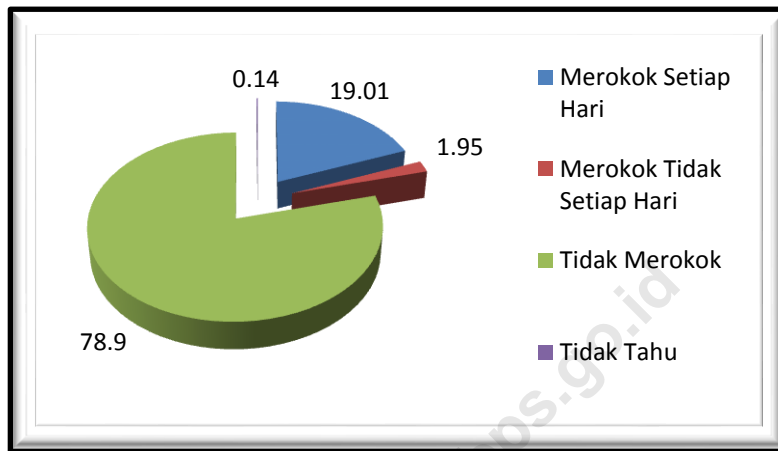
Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Salah satu tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

## **2.5. Kebiasaan Merokok**

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Merokok adalah suatu aktivitas yang kini tidak asing lagi kita dengar atau lihat. Di mana pun, khususnya di Indonesia, merokok menjadi suatu aktivitas yang lumrah bahkan biasa. Makin banyak perokok dari berbagai kalangan usia, termasuk usia anak sekolah. Terlepas dari itu, rokok sangat berbahaya bagi kesehatan para perokok aktif maupun pasif yang hanya terpapar asap dari rokok tersebut.

Grafik 2.3 menunjukkan persentase penduduk yang memiliki kebiasaan merokok. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki kebiasaan merokok, baik setiap hari maupun tidak setiap hari, masing-masing sebesar 19,01 persen dan 1,95 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak merokok sebesar 78,9 persen. Hal ini menunjukkan masih banyaknya penduduk yang memiliki kesadaran untuk tidak merokok.

**Grafik 2.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kebiasaan Merokok selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Jepara, 2016**



Sumber : Susenas 2016

**Tabel. 2.4 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama sebulan terakhir menurut jumlah batang rokok yang dihisap per minggu di Kabupaten Jepara.**

Jumlah Batang	Persentase
(1)	(2)
1 - 6	0,17
7 - 14	3,49
15 - 29	8,08
30 - 59	20,91
60 +	67,35
Jumlah	100

Berdasarkan Tabel 2.4, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir paling banyak menghisap rokok tembakau lebih dari 60 batang rokok per minggu yaitu sebesar 67,35 persen. Penduduk yang merokok sebanyak 30-59 batang rokok

dan 15-29 batang rokok masing-masing sebesar 20,91 persen dan 8.08 persen. Sementara itu, penduduk yang merokok 1-6 batang per minggu hanya sekitar 0,17 persen.

<https://jeparakab.bps.go.id>

## BAB 3

## PENDIDIKAN

<https://jeparakab.bps.go.id>



<https://jeparakab.bps.go.id>

## **BAB III**

### **P E N D I D I K A N**

Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan bangsa. Penduduk yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan akan mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya.

Pembangunan sarana prasarana sekolah serta ditunjang dengan program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas juga. Kualitas sumber daya manusia dapat juga diukur salah satunya dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk umur 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat mengindikasikan sampai sejauh mana tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Jepara sekitar 7,32 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (25 tahun ke atas) baru dapat menyelesaikan sampai kelas 6 SD (Tamat SD). Kondisi tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya (7,31 tahun).

### 3.1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan tingkat kemampuan/keahlian dan pengetahuannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan juga akan menempatkan tingkat sosialnya di masyarakat. Dengan bekal tingkat pendidikan semakin tinggi maka peluang seseorang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan akan semakin luas sehingga akan memberikan pendapatan yang lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kesejahteraannya.

**Tabel 3.1. Presentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak / Blm Pernah Sekolah	1,57	4,24	2,92
2. Tidak / Belum Tamat SD	14,46	17,76	16,13
3. SD / MI / SDLB / Paket A	42,66	40,12	41,38
4. SMP / MTs / SMPLB / Paket B	18,01	22,15	20,09
5. SMA / SMK / MA / SMLB / Paket C	20,42	12,98	16,67
6. Diploma / Universitas	2,88	2,75	2,81
Total	100	100	100

Sumber : Susenas 2016

Dari tabel 3.1 dapat diketahui sebagian besar yaitu 41,38 persen penduduk umur 10 tahun ke atas telah menamatkan SD atau setara, 20,09 persen telah menamatkan pendidikan setingkat SMP. Penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak/belum menamatkan SD atau setara relatif masih cukup tinggi yaitu 16,13 persen.

Dilihat dari jenis kelamin tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk

penduduk umur 10 tahun ke atas relatif lebih baik pada penduduk laki-laki. Perbedaan tertinggi ada pada penduduk umur 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan setara SMA yaitu pada penduduk laki-laki sebesar 20,42 persen sedangkan perempuan sebesar 12,98 persen atau selisih sekitar 7,44 persen. Demikian juga untuk yang tidak/belum pernah sekolah dengan jenis kelamin perempuan lebih besar dibanding laki-laki yaitu masing-masing sebesar 4,24 persen dan 1,57 persen. Persepsi masyarakat bahwa perempuan sebagai “*tiang wingking*” mempunyai andil terhadap kondisi tersebut.

### **3.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan meratakan fasilitas pendidikan di semua wilayah NKRI bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dengan hal tersebut diharapkan makin banyak masyarakat yang dapat bersekolah. Salah satu indikator penting yang dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada kelompok umur tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya

Pada tahun 2016 di Kabupaten Jepara penduduk umur 7-12 yang bersekolah sebesar 100 persen, artinya tidak ada penduduk pada usia tersebut yang belum bersekolah. Sementara untuk penduduk kelompok umur 13 – 15 tahun yang bersekolah sebesar 92,40 persen, kelompok umur 16 - 18 tahun ada 62,74 persen. Kalau dilihat berdasarkan jenis kelamin, partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun dan 16 – 18 tahun lebih tinggi penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki, namun ketika pada usia 19-24 tahun partisipasi sekolahnya berbanding terbalik.

**Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
07 - 12	100	100	100
13 - 15	91,41	93,35	92,4
16 - 18	61,89	63,71	62,74
19 - 24	18,66	11,82	15,18

Sumber : Susenas 2016

### 3.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar merupakan rasio jumlah siswa, berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan adanya siswa dengan umur lebih tua dibanding umur standar di jenjang pendidikan tertentu. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2016 di Kabupaten Jepara untuk SD/MI adalah 110,34 persen. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 86,24 persen dan 85,84 persen. Sedangkan untuk Jenjang Diploma/ Universitas Sebesar 9,66

**Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	111,35	108,56	110,34
SMP/MTs	89,53	83,07	86,24
SMA/MA	83,47	88,52	85,84
Diploma/Universitas	10,1	9,25	9,66

Sumber : Susenas 2016

### 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS dan APK indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2016 dari tabel 3.3 menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 96,37 persen artinya bahwa 96,37 persen penduduk umur 7-12 tahun masih bersekolah di SD/MI. Sementara APM untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA adalah masing-masing 79,26 persen dan 57,86 persen. Dan APM untuk jenjang Diploma/universitas sebesar 8.03 persen.

**Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	94,44	98,27	96,37
SMP/MTs	78,79	79,71	79,26
SMA/MA	56,97	58,85	57,86
Diploma/Universitas	8,43	7,65	8,03

Sumber : Susenas 2016

## BAB 4

# PERUMAHAN

<https://jeparakab.bps.go.id>



<https://jeparakab.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **PERUMAHAN**

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Rumah yang sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal berlindung yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salahsatu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

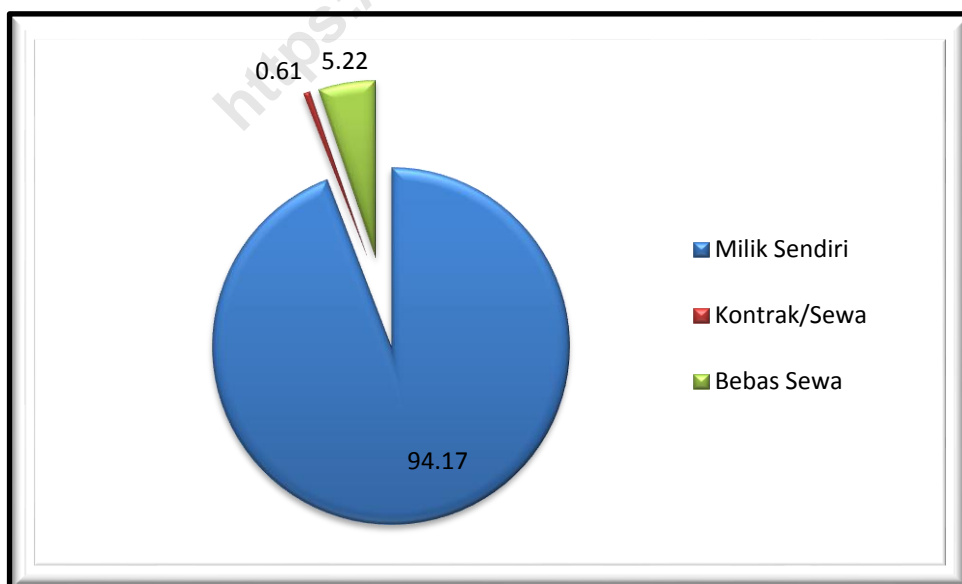
#### **4.1. Penguasaan Tempat Tinggal**

Penguasaan tempat tinggal menjadi salah satu indikator kesejahteraan penduduk dalam perumahan. Semakin banyak persentase

rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kepemilikan rumah tempat tinggal merupakan cerminan tingkat kemapanan dari penduduk. Kepemilikan dalam data Susenas dibagi dalam beberapa kriteria antara lain milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal oleh rumah tangga di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 94,17 persen diantaranya adalah milik sendiri. Status kepemilikan lainnya yaitu bebas sewa (status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain dan ditempati/ditinggali oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan biaya) sebesar 5,22 persen, rumah tangga dengan status kepemilikan kontrak/sewa 0,61 persen.

**Grafik 4.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

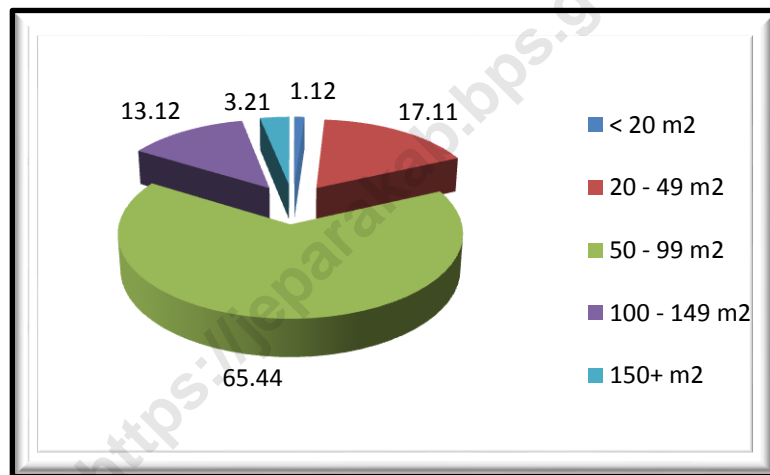


Sumber : Susenas 2016

## 4.2. Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Luas rumah yang ditempati dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin tinggi status sosial suatu rumah tangga maka semakin luas lantai yang dikuasai rumah tangga. Oleh karena itu, luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.

**Grafik 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Jepara Tahun 2016**



Sumber : Susenas 2016

Luas lantai bangunan yang dikuasai rumah tangga di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 65,44 persen mempunyai luas 50-99 m<sup>2</sup>. Kemudian persentase terbesar selanjutnya yaitu sekitar 17,11 persen rumah tangga menguasai bangunan tempat tinggal dengan luas 20-49 m<sup>2</sup>. Kemudian disusul bangunan tempat tinggal dengan luas lantai 100-149 m<sup>2</sup> dan lebih dari 150 m<sup>2</sup> masing-masing sebesar 13,12 persen dan 3,21 persen. Kemudian sisanya sebesar 1,12 persen rumah tangga yang menguasai bangunan tempat tinggal dengan luas lantai kurang dari 20 m<sup>2</sup>

Semakin banyak rumah tinggal yang menggunakan lantai bukan

tanah mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas perumahan di suatu daerah. Rumah tangga yang mempunyai rumah tinggal berlantai bukan tanah di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 80,32 persen. Dan mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015. Namun jika dibandingkan kualitas perumahan berdasarkan dinding rumah, tren-nya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan adanya penambahan rumah hunian baru akibat penambahan rumah tangga baru.

**Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan Tempat Tinggal Kabupaten Jepara, 2015-2016**

Kualitas Perumahan (1)	Tahun	
	2015 (3)	2016
Lantai Bukan Tanah	83,44	80,32
Dinding Permanen	85,78	88,22
Atap Layak	98,9	98,63

Sumber : Susenas 2015 dan 2016

Secara keseluruhan, bila dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan, kondisi perumahan di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 relatif memenuhi kriteria rumah sehat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase rumah tinggal dengan dinding permanen (88,22 persen) dan atap layak (98,63 persen).

#### 4.3. Fasilitas Perumahan

Kelengkapan fasilitas yang ada dalam bangunan tempat tinggal merupakan indikator dari tingkat kualitas dan kenyamanan tempat tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Fasilitas yang digunakan oleh

rumah tangga tersebut juga merupakan cerminan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin baik fasilitas yang tersedia maka semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Keseluruhan bangunan tempat tinggal di Kabupaten Jepara sudah dialiri listrik baik listrik PLN maupun non PLN. Ada 1,91 persen rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan sumber penerangan listrik non PLN pada tahun 2016 sisanya sebesar 98,09 persen sudah menggunakan listrik PLN.

Untuk sumber air minum utama yang digunakan di Kabupaten Jepara ada lima yaitu air kemasan, leding, pompa, sumur dan, mata air. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga

yang menggunakan sumber air minum sumur mempunyai persentase terbesar mencapai 47,78 persen kemudian menggunakan pompa ada 26,90 persen, air kemasan 10,95 persen, leding 7,77 persen dan menggunakan mata air mencapai 6,60 persen.

Tempat buang air besar merupakan indikator yang tidak kalah penting karena akan berpengaruh sangat besar terhadap sanitasi rumah

**Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal yang Dikuasai di Kabupaten Jepara Tahun 2016**

<b>Uraian</b>	<b>Persentase</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Sumber Penerangan</b>	
Listrik PLN	98,09
Listrik Non PLN	1,91
<b>Sumber Air Minum</b>	
Air Kemasan	10,95
Leding	7,77
Pompa	26,90
Sumur	47,78
Mata Air	6,60
Air Hujan dan Lainnya	0,00
<b>Tempat Buang Air Besar</b>	
Sendiri	76,50
Bersama	14,54
Umum	1,56
Tidak Ada	7,40

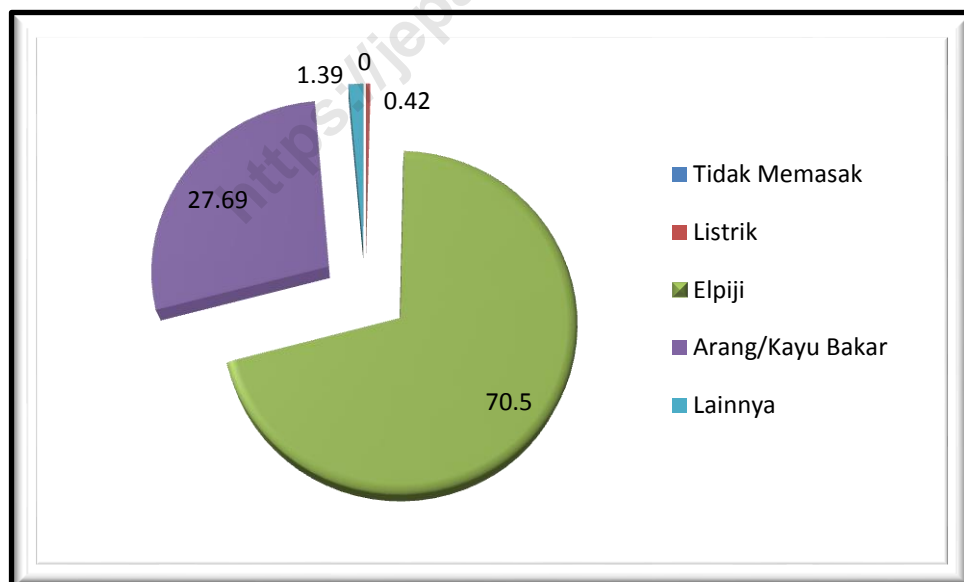
*Sumber : Susenas 2016*

yang berimplikasi pada kesehatan penghuninya. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 76,50 persen rumah tangga sudah memiliki tempat buang air besar sendiri, 14,54 persen menggunakan tempat buang air besar secara bersama dengan rumah tangga lain, 1,56 persen menggunakan tempat buang air besar umum dan sisanya 7,40 persen tidak memiliki tempat buang air besar.

#### 4.4. Bahan Bakar Memasak

Memasak merupakan salah satu kegiatan yang tak lepas dari kehidupan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Keberagaman bahan bakar yang digunakan untuk memasak menjadikan masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.

**Grafik 4.3 Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak di Kabupaten Jepara, 2016**



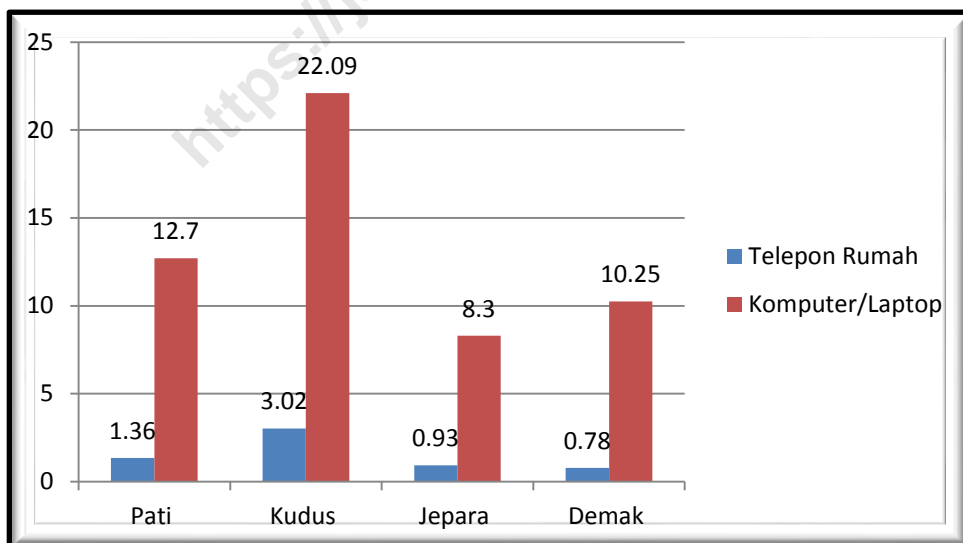
Grafik 4.3, menunjukkan jenis bahan bakar yang digunakan rumahtangga untuk memasak. Jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat adalah elpiji sebesar 70,5 persen. Hal ini disebabkan mudahnya akses terhadap bahan bakar elpiji yang tersedia

baik di pedesaan maupun perkotaan oleh masyarakat. Sementara untuk bahan bakar biogas/ gas kota belum tersedia di wilayah kabupaten Jepara.. Bahan bakar untuk memasak selanjutnya adalah arang/kayu bakar dengan persentase sebesar 27,69 persen. Sementara minyak tanah jarang digunakan karena keberadaanya yang langka di masyarakat.

#### 4.5. Penguasaan Alat Komunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kepemilikan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi telepon selular membuat telepon rumah semakin ditinggalkan.

**Grafik 4.4 Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Sekitarnya, 2016**



Berdasarkan Grafik 4.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di Kabupaten Jepara sebesar 0,93 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya maka persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di kabupaten



Jepara masih kalah dibandingkan Kabupaten Kudus (3,02 Persen) dan Kabupaten Pati (sebesar 1,36 persen). Sementara jika dilihat dari kepemilikan komputer/laptop di kabupaten Jepara persentasenya sebesar 8,3 persen. Dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya persentasenya kalah dibanding dengan Kabupaten Kudus (22,09 persen), Kabupaten Pati (12,7 persen) dan Kabupaten demak (10,25 persen).

<https://jeparakab.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jeparakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA**  
Jl. Ratu Kalinyamat Jepara Telp./Fax : (0291) 591119  
E-mail : bps3320@bps.go.id; Website : jeparakab.bps.go.id

118 118-118-118-1

